

EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PADA TAHUN 2024

Rasji, George Daniel Pangaribuan,
Arlyn Zahwa Naylaputri, Rizq Rafi Rabbani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Rasji

Abstract.

Pemilu, short for Pemilihan Umum, is the democratic process by which the citizens of a country elect their representatives in government. It is an important mechanism in a democratic system that allows the people to participate in government formation and decision-making. In an election, citizens have the right to vote for candidates or political parties that they believe will represent their interests and aspirations in the legislature or executive. The candidate or political party that gains majority support in an election will gain a seat or position in the government. The electoral process includes various stages, such as candidate registration, campaigning, voting and vote counting. Elections are usually governed by an independent electoral body, which is responsible for ensuring the smoothness, fairness and integrity of the electoral process. Elections are a key pillar of a democratic system that allows people to express their political preferences and influence the direction of government policy. Through elections, people have the opportunity to express their opinions and elect leaders who they believe will best represent and serve the public interest. Elections must be assessed for their effectiveness to evaluate elections from period to period. In this research we will examine the effectiveness of the 2024 General Election held in Indonesia and how to improve the effectiveness of the General Election in Indonesia.

Keywords: *Pemilu; Effectiveness ;General Election; Pemilu 2024, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pemilu, singkatan dari Pemilihan Umum, adalah proses demokratis di mana warga negara suatu negara memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Proses pemilu melibatkan berbagai tahapan, seperti pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilu memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: memastikan representasi warga negara: Pemilu memungkinkan warga negara untuk memilih

wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, mendorong akuntabilitas: Dengan adanya pemilu, para pemimpin terpilih harus bertanggung jawab kepada pemilih atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil, dan menjaga stabilitas politik: Pemilu secara teratur membantu menjaga stabilitas politik dengan memberikan kesempatan bagi perubahan kepemimpinan secara damai.

Pemilu dapat diadakan untuk berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemilihan presiden, anggota parlemen, hingga pemilihan kepala daerah. Partisipasi aktif warga negara dalam pemilu sangat penting untuk memastikan proses demokratis berjalan dengan baik dan hasil yang dihasilkan mewakili kehendak rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota–anggota Presiden, DPR, DPRD. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia¹.

Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, setelah melalui periode pemerintahan Soekarno. Pada periode ini, sistem pemerintahan masih berada dalam fase parlementer. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu ini dilaksanakan dua kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota Dewan Konstituante pada 25 Desember 1955.²

Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung.³ Tujuan dari pemilihan umum adalah menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

¹ Widagdo1995, *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER*, Jakarta, Sinar Harapan. Hal 108

² Azra, N. (2024) Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa Ke Masa, Mulai 1955 hingga 2019, UICI. <https://uici.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> (Diakses: 22 April 2024).

³ Dwi, A. (2023) Pengertian Dan Sejarah Pemilu di Indonesia, FISIP UMSU Terbaik di Medan. <https://fisip.umsu.ac.id/pengertian-dan-sejarah-pemilu-di-indonesia/> (Diakses: 22 April 2024).

Pemilu di Indonesia telah melalui berbagai perubahan dan evolusi, mulai dari masa kolonial hingga era modern. Pemilu kolonial dimulai pada tahun 1905, di mana sejumlah perwakilan pribumi dipilih untuk duduk di Volksraad, badan legislatif yang didominasi oleh Belanda. Pemilu tersebut adalah Pemilu Konstituante, yang bertujuan untuk memilih anggota badan legislatif yang akan menyusun konstitusi negara. Partai-partai politik yang beragam ikut serta dalam pemilu ini, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Masyumi.

Pada tahun 1946, pemilihan umum pertama diadakan di Karesidenan Kediri dan Surakarta. Kemudian, pada tahun 1948, Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) menyetujui undang-undang yang menetapkan sistem pemilihan umum tidak Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie, dan pemilu berikutnya dilakukan pada tahun 1999. Pada tahun 2014, pemilu umum diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.⁴

Pemilu di Indonesia terus berkembang menuju proses yang lebih adil, transparan, dan mewakili kehendak rakyat. Dengan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, pemilu di Indonesia akan terus menjadi sarana yang penting untuk mengekspresikan opini politik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Pemilu terakhir di Indonesia baru-baru ini dilaksanakan, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Penerapan pemilu di Indonesia pada 2024 sudah mulai berjalan baik, sebagai dapat dilihat dari pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang berjalan dengan baik. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti digitalisasi pemilu dengan penerapan e-voting, yang masih perlu kajian komprehensif dan pengembangan sistem keamanan data. Selain itu, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai politik, dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sudah berjalan secara baik.

Indeks kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Pemilu 2024 menunjukkan variasi dalam persepsi publik. Survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami penurunan setelah pemungutan suara, turun dari 94,5% menjadi 83,6% dalam 5 hingga 10 hari setelah Pemilu. Meskipun mayoritas masyarakat masih menilai

⁴ Annisa (2023) Sejarah Pemilu di Indonesia, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/> (Diakses: 22 April 2024).

penyelenggaraan Pemilu 2024 memuaskan, terdapat penurunan signifikan dalam tingkat kepuasan setelah pemungutan suara.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca-Pemilihan Presiden 2024 mencapai 73%. Faktor yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap MK termasuk keputusan positif MK terkait dengan Jaksa Agung, parliamentary threshold (PT), jadwal pilkada, dan transparansi sidang PHPU. Putusan MK yang diapresiasi publik, seperti tentang syarat capres cawapres, juga membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu kami penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang bagaimana keefektifitasan penerapan pemilu di Indonesia yang akan dijabarkan dalam makalah yang berjudul “Efektivitas Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Tahun 2024”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan dua tujuan dasar yaitu untuk sebagai berikut:

- 1) mendeskripsikan dan mengungkapkan,
- 2) menggambarkan dan menjelaskan; untuk menghasilkan pengembangan dalam minat untuk fenomena tertentu serta penyelesaiannya atau *grounded theory*⁵ dengan metode yuridis normatif untuk meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitian aturan/norma/hukum/peraturan yang berada di tengah masyarakat yang akan menggambarkan hukum sebagai sistem konseptual dan hukum sebagai sistem hukum yang positif dengan *output* tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum secara luas, baik dari segi sistem baik dalam konseptual ilmiah maupun dalam bentuk vertikal/horizontal⁶.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan metode studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan serta doktrin juga melihat yang dimana merupakan serangkaian kegiatan kegiatan yang

⁵ Nasution , “ Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,” dalam Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 14.

⁶ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 5.

berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat serta pengolahannya menjadi bahan penelitian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah penerapan Pemilu tahun 2024 di Indonesia sudah efektif?

Efektivitas penerapan pemilu di Indonesia adalah subjek kompleks yang melibatkan banyak faktor. Sejak era reformasi, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan proses pemilu, seperti penggunaan teknologi, partisipasi pemilih, dan transparansi. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi.

Positifnya, proses pemilu di Indonesia semakin terstruktur dan terorganisir, dengan peningkatan partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Penggunaan teknologi, seperti sistem informasi pemilih dan penghitungan suara elektronik, telah membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu.

Namun, masih ada beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas pemilu. Salah satunya adalah isu kecurangan dan manipulasi dalam proses pemilihan, baik itu oleh calon politik maupun oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ketimpangan akses terhadap proses politik juga menjadi masalah serius, terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil.

Penting untuk terus memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan pengawasan, dan mengatasi tantangan yang muncul demi memastikan bahwa pemilu di Indonesia benar-benar efektif, adil, dan demokratis. Meskipun telah ada kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut agar pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak reformasi. Namun, ada banyak faktor yang memengaruhi efektivitasnya, termasuk proses pemungutan suara, partisipasi masyarakat, dan integritas pemilihan. Secara umum, terdapat indikasi bahwa pemilu di Indonesia semakin efektif, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kecurangan, manipulasi, dan ketimpangan akses terhadap proses politik. Data terkini dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) bisa memberikan gambaran lebih detail mengenai efektivitas pemilu di Indonesia.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm 3.

Pemilu terakhir di Indonesia baru-baru ini dilaksanakan, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Penerapan pemilu di Indonesia pada 2024 sudah mulai berjalan baik, sebagai dapat dilihat dari pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang berjalan dengan baik. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti digitalisasi pemilu dengan penerapan e-voting, yang masih perlu kajian komprehensif dan pengembangan sistem keamanan data. Selain itu, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai politik, dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sudah berjalan secara baik.

Indeks kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Pemilu 2024 menunjukkan variasi dalam persepsi publik. Survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami penurunan setelah pemungutan suara, turun dari 94,5% menjadi 83,6% dalam 5 hingga 10 hari setelah Pemilu. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 59,8% masyarakat meyakini bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Sementara, 34,8% publik menilai ada campur tangan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Meskipun mayoritas masyarakat masih menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 memuaskan, terdapat penurunan signifikan dalam tingkat kepuasan setelah pemungutan suara.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca-Pemilihan Presiden 2024 mencapai 73%. Faktor yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap MK termasuk keputusan positif MK terkait dengan Jaksa Agung, parliamentary threshold (PT), jadwal pilkada, dan transparansi sidang PHPU. Putusan MK yang diapresiasi publik, seperti tentang syarat capres cawapres, juga membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia masih menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 memuaskan, Indonesia masih memiliki beberapa kendala dalam pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Logistik: Persiapan logistik untuk pemilu bisa menjadi tantangan besar, terutama di negara dengan geografi yang luas seperti Indonesia. Distribusi materi pemungutan suara, peralatan pemungutan suara, dan pengaturan tempat pemungutan suara yang tepat merupakan faktor penting dalam kelancaran proses pemilu.
2. Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem pencatatan pemilih elektronik atau mesin pemungutan suara elektronik, sering kali menyebabkan kontroversi dan masalah teknis. Kegagalan teknologi dapat mengganggu proses pemungutan suara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. (Seperti masalah Sirekap yang sempat beredar)

3. Keamanan: Perlindungan terhadap pemilih, petugas pemilu, dan sarana pemungutan suara dari ancaman keamanan seperti intimidasi, ancaman kekerasan, atau penipuan pemilu merupakan aspek penting dalam menjaga integritas pemilu.
4. Transparansi dan Kepatuhan: Transparansi dalam proses pemilu dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ada merupakan faktor penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Ketidakpatuhan terhadap aturan, misalnya terkait dengan keuangan kampanye atau praktik korupsi, dapat mengurangi integritas pemilu.
5. Partisipasi Pemilih: Menyadarkan dan memotivasi pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu juga merupakan tantangan, terutama di kalangan kelompok yang kurang terwakili atau memiliki akses terbatas terhadap informasi.
6. Kontroversi Politik: Persaingan politik yang sengit sering kali menyebabkan ketegangan dan kontroversi, baik selama kampanye maupun setelah pemungutan suara. Konflik politik dapat mengganggu proses pemilu dan mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan integritas pemilu.

Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pemilu di Indonesia?

Tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pemilu di Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Perbaikan sistem pemilihan: Perlu dilakukan perbaikan sistem pemilihan yang lebih efektif dan transparan. Ini dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pengaturan, pengelolaan data, dan pengawasan.
2. Peningkatan transparansi: Perlu dilakukan peningkatan transparansi dalam proses pemilihan, seperti pembukaan data pemilih, data kandidat, dan data pengeluaran.
3. Peningkatan kualifikasi pemilih: Perlu dilakukan peningkatan kualifikasi dan pendidikan pemilih, seperti mengajarkan tentang hak-hak dan tanggung jawab pemilih, mengenalpasti kandidat, dan mengenalpasti isu-isu yang penting.
4. Peningkatan pengawasan: Perlu dilakukan peningkatan pengawasan pemilihan, seperti pengawasan oleh pihak terkait, pengawasan oleh masyarakat, dan pengawasan oleh media.
5. Peningkatan pengampuannya: Perlu dilakukan peningkatan pengampuannya, seperti pengumpulan data tentang kandidat, isu-isu,

dan pendukung yang dapat digunakan oleh pemilih untuk membuat pemilihan yang lebih baik.

6. Peningkatan pengenalan kandidat: Perlu dilakukan peningkatan pengenalan kandidat, seperti mengumpulkan informasi tentang kandidat, mengumpulkan informasi tentang pendukung, dan mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang penting.
7. Peningkatan pengawasan media: Perlu dilakukan peningkatan pengawasan media, seperti mengawasi laporan media tentang pemilihan, mengawasi laporan media tentang kandidat, dan mengawasi laporan media tentang isu-isu yang penting.
8. Peningkatan pengawasan pihak terkait: Perlu dilakukan peningkatan pengawasan pihak terkait, seperti pengawasan oleh ketua pemilihan, pengawasan oleh komisisaris pemilihan, dan pengawasan oleh pihak pemerintah.
9. Peningkatan pengawasan masyarakat: Perlu dilakukan peningkatan pengawasan masyarakat, seperti mengawasi laporan masyarakat tentang pemilihan, mengawasi laporan masyarakat tentang kandidat, dan mengawasi laporan masyarakat tentang isu-isu yang penting.
10. Peningkatan pengawasan keluarga pemilih: Perlu dilakukan peningkatan pengawasan keluarga pemilih, seperti mengawasi laporan keluarga pemilih tentang pemilihan, mengawasi laporan keluarga pemilih tentang kandidat, dan mengawasi laporan keluarga pemilih tentang isu-isu yang penting.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, dapat diharapkan bahwa pemilihan di Indonesia akan lebih efektif dan transparan, dan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pemilu tahun 2024 di Indonesia sudah cukup efektif bisa dilihat dari data sebagai berikut: Indeks kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Pemilu 2024 menunjukkan variasi dalam persepsi publik. Survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami penurunan setelah pemungutan suara, turun dari 94,5% menjadi 83,6% dalam 5 hingga 10

hari setelah Pemilu. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 59,8% masyarakat meyakini bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Sementara, 34,8% publik menilai ada campur tangan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, masih memerlukan perbaikan dalam beberapa bidang untuk meningkatkan keefektivitasnya.

2. Adapun cara untuk meningkatkan keefektivitasan Pemilu di Indonesia dapat dilakukan cara sebagai berikut perbaikan sistem pemilihan, Peningkatan transparansi, Peningkatan kualifikasi pemilih, Peningkatan pengawasan, Peningkatan pengampuannya, Peningkatan pengenalan kandidat, Peningkatan pengawasan media, Peningkatan pengawasan pihak terkait, Peningkatan pengawasan masyarakat, Peningkatan pengawasan keluarga pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa (2023) *Sejarah Pemilu di Indonesia*, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/> (Diakses pada: 22 April 2024).

Azra, N. (2024) *Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa Ke Masa, Mulai 1955 hingga 2019*, UICI. <https://uici.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> (Diakses pada: 22 April 2024).

Dwi, A. (2023) *Pengertian Dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, FISIP UMSU Terbaik di Medan. <https://fisip.umsu.ac.id/pengertian-dan-sejarah-pemilu-di-indonesia/> (Diakses pada: 22 April 2024).

Irwan, A. and Edriana (1995) *Pemilu Pelanggaran Asas Luber Hegemoni Tak Sampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mestika Zed (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Nasution (2018) *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah (2020), *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non*

Doktrinal Makassar : CV. Social Politic Genius